

## ABSTRAK

Nadhiva Sofia Wahyudi,126103202167, Upaya Perusahaan Kehutanan Negara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023, Pembimbing Yusron Munawir S.H.,M.H

**Kata kunci:** *illegal logging*, Perhutani, hutan

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya kasus *illegal logging* yang terjadi pada tahun 2023 dengan kasus pembalakan sonokeling di tengah hutan Desa Kedungsigit dimana bertambahnya kasus *illegal logging* terdapat ken total delapan tersangka. Sehingga dari peristiwa tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai upaya penanggulangan *illegal logging* serta kendala yang ada dalam upaya hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana Perhutani Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek? 2)Apa saja Hambatan dan Bagaimana Solusi Perhutani Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek?. Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah 1) Untuk Mendiskripsikan Upaya Perhutani Dalam *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek. 2) Untuk Menganalisis Hambatan Perhutani Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa menggunakan teknik kondensasi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut: 1) Perhutani dalam menanggulangi kasus *illegal logging* melakukan upaya preventif yaitu a) patroli rutin dan gabungan untuk mencegah terjadinya *illegal logging*. b) melakukan sosialisasi terkait fungsi dan manfaat hutan sebagai penyangga dan sosialisasi terkait hukum dan undang-undang kehutanan. c) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama yang berdekatan dengan wilayah kawasan hutan. Sedangkan upaya represif dari perhutani adalah pelaksanaan penangkapan pelaku *illegal logging* dan melakukan penanggulangan reboisasi terhadap hutan yang rusak. Dikaitkan dengan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, Faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana dari upaya penanggulangan

illegal logging belum sesuai dengan tujuan dibuktikan dari patrol yang sebatas menggunakan mobil dan motor oleh polisi hutan dan perhutani penyidik serta tidak adanya prasarana berupa menara pengawas, ilaran api . Upaya tersebut jika ditinjau dari teori faktor hukum menurut Soerjono Soekanto sebagian sudah berjalan sesuai dengan teori tersebut, dibuktikan dari dasar hukum illegal logging sudah jelas yaitu Pasal 83 UU Nomor 18 Tahun 2013, pejabat yang berwenang sudah jelas yaitu polisi hutan, penyidik dari perhutani atau dari Polres Trenggalek.

2) Hambatan/kendala Perhutani dalam upaya preventif menanggulangi illegal logging yaitu a) Pendidikan masyarakat yang rendah akan pentingnya fungsi dan manfaat kawasan hutan/lingkungan. b) tingkat kepatuhan hukum yang rendah akan peraturan *illegal logging*. Sedangkan Hambatan/kendala Perhutani dalam upaya represif menanggulangi *illegal logging* yaitu a) lamanya proses pemidanaan dari pelaku illegal logging. b) Kurang cepatnya dalam menangkap pelaku DPO *illegal logging* dari pihak perhutani maupun Polres. Saat ini solusi yang diterapkan perhutani dari beberapa kendala upaya preventif Perhutani berupa a) melakukan penyuluhan mengenai sanksi dan akibat dari illegal logging. b) menindak dengan tegas pelaku *illegal logging* yang ada di kabupaten Trenggalek yang kemudian dapat dijadikan contoh bagi masyarakat sekitar terkait sanksi tindakan *illegal logging*. Sementara, solusi atas kendala sarana prasarana maka akan diperbaiki dan dilengkapi kembali. Sedangkan solusi terkait upaya represif penanggulangan *illegal logging* dari perhutani berupa a) melakukan operasi gabungan untuk agar nantinya proses hukum dapat berjalan lancar dikarenakan banyaknya saksi yang dihadirkan. b) komunikasi terbuka terkait evaluasi dari tindakan penangkapan yang dilakukan.

## ABSTRACT

Nadhiva Sofia Wahyudi, 126103202167, "Efforts of the State Forestry Company in Combating Illegal Logging in the Forest Management Area of Kedungsigit Village, Trenggalek Regency," Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, supervised by Yusron Munawir, Bachelor of Law., Master of Law

### **Keywords: illegal logging, Perhutani, forest**

This research is motivated by the illegal logging case that occurred in January 2023 in the middle of the forest in Kedungsigit Village, where the illegal logging of Sonokeling trees took place. There were a total of eight suspects, with one individual still at large. Consequently, this incident prompted the researcher to investigate the efforts to combat illegal logging and the challenges encountered in the legal processes.

The problem statements of this research are: 1) How are Perhutani's efforts to tackle illegal logging in the forest management area of Kedungsigit Village, Trenggalek Regency? 2) What are the obstacles faced by Perhutani in combating illegal logging in the forest management area of Kedungsigit Village, Trenggalek Regency? Based on these problem statements, the research objectives are: 1) To describe Perhutani's efforts in tackling illegal logging in the forest management area of Kedungsigit Village, Trenggalek Regency. 2) To analyze the obstacles faced by Perhutani in combating illegal logging in the forest management area of Kedungsigit Village, Trenggalek Regency. This research employs a qualitative approach with an empirical juridical method. The data sources used in this study are drawn from both primary and secondary sources. The data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. For data analysis, the study utilizes techniques of data condensation, data presentation, and conclusion drawing.

This research method uses qualitative research using empirical juridical methods. The data sources used in this research were taken from primary and secondary data sources. The data collection technique used in this research is observation, in-depth interviews and documentation. Meanwhile, the analysis technique uses data condensation techniques, data presentation and drawing conclusions.

The research findings are as follows: 1) Perum Perhutani's efforts to combat illegal logging include both preventive and repressive measures. a) Preventive efforts encompass routine and joint patrols to prevent illegal logging, b) public awareness campaigns on the functions and benefits of forests as ecological buffers, as well as on forestry laws and regulations, and c) coordination

with relevant parties, especially those near forest areas. Repressive measures involve the a) arrest of illegal logging perpetrators and b) reforestation of damaged forests. According to Soerjono Soekanto's theory of law enforcement, the efforts are partially effective; the enforcement and infrastructure factors have not fully met their objectives. This is evidenced by the reliance on vehicles like cars and motorcycles for patrols by forest police and Perhutani investigators, and the lack of infrastructure such as watchtowers and firebreaks. However, some aspects align with Soekanto's theory of legal factors, as the legal basis for combating illegal logging is clear in Article 83 of Law No. 18 of 2013, and the authorities responsible, such as forest police and investigators from Perhutani or the Trenggalek Police Department, are well defined. 2) Perhutani faces several challenges in preventive efforts: a) low public education on the importance of forest areas and the environment, and b) low compliance with illegal logging regulations. In repressive efforts, challenges include a) lengthy prosecution processes and b) delays in apprehending wanted suspects (DPO) by both Perhutani and the police. To address these, Perhutani is implementing solutions such as a) educational campaigns about the penalties and consequences of illegal logging and b) strict enforcement against offenders in Trenggalek to set an example for the community. Infrastructure issues will be addressed through improvements and enhancements. For repressive measures, a) joint operations are conducted to ensure smooth legal processes due to the availability of many witnesses, and b) there is open communication regarding the evaluation of the arrest procedures.

## الملخص

ناضيفاً صوفيا واهيودي، ١٢٦١٠٣٢٠٢١٦٧، جهود شركة بيروهوتاني في مكافحة التحطيب غير المشروع في مناطق الغابات المدارة في قرية كيدونغسيجيت، مقاطعة ترينجاليك، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمام علي رحمة الله تولونجاونغ، ٢٠٢٣، المشرف: يسران مناور، بكالوريوس القانون، ماجستير القانون.

### الكلمات الرئيسية: التحطيب غير المشروع، بيروهوتاني، الغابة

يتم تحفيز هذا البحث من خلال حالة تحطيب الغابات التي وقعت في يناير ٢٠٢٣ في منتصف الغابة في قرية كيدونغسيجيت، حيث وقع تحطيب غير شرعي لأشجار السونوكيلينغ. كان هناك مجموعة من ثمانية مشتبه بهم، مع مواطن واحد لا يزال طليقاً. وبالتالي، دفعت هذه الحادثة الباحث إلى التحقيق في الجهود المبذولة لمكافحة التحطيب غير الشرعي والتحديات التي تواجهها في العمليات القانونية.

تتمثل إشكالية هذا البحث في: (١) ما هي جهود شركة "برهوتاني" في مكافحة قطع الأشجار غير القانوني في منطقة إدارة الغابات بقرية كيدونغسيجيت، مقاطعة ترينجاليك؟ (٢) ما هي العوائق التي تواجه شركة "برهوتاني" في مكافحة قطع الأشجار غير القانوني في منطقة إدارة الغابات بقرية كيدونغسيجيت، مقاطعة ترينجاليك؟ وبناءً على هذه الإشكالية، فإن أهداف البحث هي: (١) وصف جهود شركة "برهوتاني" في مكافحة قطع الأشجار غير القانوني في منطقة إدارة الغابات بقرية كيدونغسيجيت، مقاطعة ترينجاليك. (٢) تحليل العوائق التي تواجه شركة "برهوتاني" في مكافحة قطع الأشجار غير القانوني في منطقة إدارة الغابات بقرية كيدونغسيجيت، مقاطعة ترينجاليك. ويستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً بطريقة قانونية تجريبية، حيث تعتمد مصادر البيانات المستخدمة في الدراسة على مصادر أولية وثانوية، وتشمل تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات المتعمقة والتوثيق، أما لتحليل البيانات فيتم استخدام تقنيات تكثيف البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تعتمد هذه الدراسة نهجاً نوعياً باستخدام الطريقة اليوريدية التجريبية القانونية. تستمد مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من مصادر أولية وثانوية على حد سواء. تتضمن تقنيات جمع

البيانات المراقبة والمقابلات العميقة والوثائقية. لتحليل البيانات، تستخدم الدراسة تقنيات تكثيف البيانات وعرضها واستخلاص الاستنتاجات.

نتائج البحث هي كما يلي: (١) تشمل جهود بيروم بيرهوتاني لمكافحة القطع غير القانوني للأشجار كلاً من التدابير الوقائية والقمعية. (أ) تشمل التدابير الوقائية القيام بدوريات روتينية ومشاركة لمنع القطع غير القانوني للأشجار، (ب) حملات التوعية العامة حول وظائف وفوائد الغابات كمصدات بيئية، وكذلك حول قوانين ولوائح الغابات، و (ج) التنسيق مع الأطراف ذات الصلة، خاصة تلك القريبة من المناطق الغابية. تتضمن التدابير القمعية (أ) اعتقال مرتكبي القطع غير القانوني للأشجار و (ب) إعادة التشجير في الغابات المتضررة. وفقاً لنظرية إنفاذ القانون لسورجونو سوكانتو، فإن هذه الجهود فعالة جزئياً؛ إذ لم تلبّ عوامل الإنفاذ والبنية التحتية الأهداف بالكامل. وهذا يتضح من الاعتماد على المركبات مثل السيارات والدراجات النارية في الدوريات من قبل الشرطة الغابية ومحققي بيرهوتاني، ونقص البنية التحتية مثل أبراج المراقبة وفواصل النار. ومع ذلك، تتوافق بعض الجوانب مع نظرية العوامل القانونية لسورجونو سوكانتو، حيث أن الأساس القانوني لمكافحة القطع غير القانوني للأشجار واضح في المادة ٨٣ من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣، والسلطات المسؤولة، مثل الشرطة الغابية والمحققين من بيرهوتاني أو من قسم شرطة ترينجاليك، محددة بوضوح. (٢) تواجه بيرهوتاني عدة تحديات في الجهود الوقائية: (أ) انخفاض مستوى التعليم العام حول أهمية المناطق الغابية والبيئة، و (ب) ضعف الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطع غير القانوني للأشجار. وفي الجهود القمعية، تشمل التحديات (أ) طول عمليات الملاحقة القانونية و (ب) التأخير في القبض على المشتبه بهم المطلوبين (د.ب.و) من قبل كل من بيرهوتاني والشرطة. لمواجهة هذه التحديات، تطبق بيرهوتاني حلولاً مثل (أ) حملات تعليمية حول العقوبات والعواقب المترتبة على القطع غير القانوني للأشجار و (ب) إنفاذ صارم ضد المخالفين في ترينجاليك لتقديم مثال للمجتمع. وسيتم معالجة قضايا البنية التحتية من خلال تحسينها وتعزيزها. وفيما يخص التدابير القمعية، (أ) يتم إجراء عمليات مشتركة لضمان سير العمليات القانونية بسلاسة نظراً لتوافر العديد من الشهود، و (ب) يوجد تواصل مفتوح القبض بشأن تقييم إجراءات